

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS PENGELOLAAN LAHAN SAWAH (Studi Pada Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

RIO ADITYA NUGRAHA

Di daerah pedesaan, pemilik lahan dan petani terkadang bekerja sama melalui perjanjian bagi hasil untuk pengelolaan sawah. Pada kenyataannya, para pihak seringkali mengandalkan kepercayaan bersama dan kesepakatan lisan untuk menerapkan pengaturan ini. Studi ini dilakukan di Desa Qurnia Mataram karena terletak di Kabupaten Lampung Tengah, wilayah dengan produksi padi terbesar di Provinsi Lampung, dan mayoritas penduduknya adalah petani. Tujuan utama studi ini adalah untuk menganalisis perjanjian bagi hasil guna menentukan jenis perlindungan hukum apa yang diberikan dan jenis upaya hukum apa yang dimiliki para pihak jika salah satu pihak lalai.

Strategi penelitian deskriptif berdasarkan prinsip normatif-empiris digunakan dalam studi ini. Strategi legislatif digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Wawancara, observasi, dan sumber sekunder merupakan sebagian besar data yang digunakan dalam analisis ini. Tinjauan pustaka dan penelitian lapangan merupakan tulang punggung proses pengumpulan data. Ada tiga langkah dalam metode pengolahan data: inspeksi data, kategorisasi data, dan pengolahan. Kami juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data.

Menurut studi dan debat, dua jenis perlindungan hukum, yang dikenal sebagai perlindungan preventif dan represif, dapat ditawarkan kepada para pihak. Lebih lanjut, para pihak memiliki pilihan untuk menempuh upaya hukum melalui beberapa saluran, termasuk proses perdata dan pidana di pengadilan, serta metode non-yudisial, seperti negosiasi langsung antara para pihak atau mediasi dengan pemerintah desa.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Perlindungan Hukum, Lahan Sawah.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR PARTIES TO PROFIT-SHARING AGREEMENTS FOR RICE FIELD LAND MANAGEMENT (Study on Qurnia Mataram Village, Seputih Mataram District, Central Lampung Regency)

By

RIO ADITYA NUGRAHA

In rural areas, landowners and growers sometimes work together via profit-sharing agreements for the management of rice fields. In actuality, the parties often rely on their mutual trust and verbal agreement to implement this arrangement. The study was conducted in Qurnia Mataram Village because it is situated in Central Lampung Regency, the region with the largest rice output in Lampung Province, and the majority of the residents are farmers. This study's overarching goal is to dissect profit-sharing agreements in order to determine what kinds of legal protections they provide and what kinds of legal remedies the parties have in the event that one of them defaults.

A descriptive research strategy based on normative-empirical principles was used in this study. The legislative strategy is utilized to address the issue. Interviews, observations, and secondary sources make up the bulk of the data used in this analysis. Literature reviews and field research were the backbone of the data gathering process. There are three steps to the data processing method: data inspection, data categorization, and processing. We also used qualitative approaches to analyze the data.

Two kinds of legal protection, known as preventative and repressive protection, may be offered to the parties, according to the study and debate. Furthermore, the parties have the option to pursue legal remedies via several channels, including civil and criminal processes in the court, as well as non-judicial methods, such as direct negotiation between the parties or mediation with the village administration.

Keywords: Profit Sharing Agreement, Legal Protection, Rice fields.